



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENAMBAHAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN UNTUK TAHUN 2025

Dewi Restu Mangeswuri
Analisis Legislatif Ahli Madya
dewi.mangeswuri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp2,74 triliun untuk Tahun Anggaran 2025. Penambahan ini telah disetujui dalam rapat kerja bersama Kemenhub pada saat penyampaian perkembangan pagu efektif Kemenhub kepada pimpinan Komisi V DPR RI, 4 September 2025. Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa pagu efektif Kemenhub untuk tahun 2025 awalnya sebesar Rp26,76 triliun. Dengan adanya tambahan tersebut, total pagu efektif Kemenhub mencapai Rp29,50 triliun.

Tambahan anggaran ini bersumber dari relaksasi blokir efisiensi senilai Rp1,62 triliun, ambang batas kinerja badan layanan umum (BLU) Rp62,90 miliar dan penambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp1,06 triliun. Sementara berdasarkan jenis belanja, penambahan sebesar Rp797,76 miliar merupakan belanja pegawai, Rp469,72 miliar belanja barang dan Rp1,48 triliun belanja modal. Menhub Dudy juga menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub tahun 2026. Untuk anggaran tahun 2026, jumlah pagu indikatif awal Kemenhub ditetapkan sebesar Rp24.405.964.808.000 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas pada 15 Mei 2025. Selanjutnya, berdasarkan surat bersama lanjutan per tanggal 24 Juli 2025, pagu anggaran Kemenhub 2026 naik menjadi Rp28.489.404.712.000. Keputusan ini berdasarkan Surat Bersama Kementerian Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S505-MK.03/2025 dan B621/D9/PP04.03/07-2025.

Seiring dengan tambahan anggaran 2025, muncul usulan untuk menambah alokasi subsidi angkutan hingga ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai subsidi angkutan di berbagai sektor layak mendapatkan tambahan. Beberapa sektor yang jadi perhatian yakni transportasi darat berupa angkutan jalan, angkutan antarmoda, angkutan barang, dan perintis penyeberangan. Subsidi transportasi udara, seperti perintis kargo, perintis penumpang, subsidi kargo, BBM penumpang, dan BBM kargo, sedangkan subsidi transportasi laut berupa penyelenggaraan angkutan tol laut dan kapal ternak. Subsidi kereta api perintis berlaku di 8 lintasan. Djoko memandang, tambahan anggaran Kemenhub ini turut bisa dialokasikan untuk KNKT.

Djoko mencatat Kemenhub mengalokasikan Rp4,39 triliun untuk subsidi angkutan di 2024. Porsi paling besar ke angkutan laut Rp1,95 triliun. Subsidi itu disebar ke 39 lintas angkutan tol laut, 105 trayek perintis laut, dan 6 trayek kapal ternak. Sedangkan, angkutan jalan mendapat porsi Rp1,49 triliun yang terbagi untuk 357 trayek bus perintis, 35 trayek antarmoda, 6 lintasan angkutan barang, 270 lintasan angkutan penyeberangan perintis, serta angkutan perkotaan. Kemudian, Rp750 miliar juga disebar ke angkutan udara, di antaranya 44 rute kargo penerbangan perintis dan 264 rute penumpang. Subsidi BBM penumpang juga diberikan agar tiket penerbangan menjadi terjangkau. Untuk kereta api, subsidi diberikan ke 8 lintasan Kereta Perintis sebesar Rp209,09 miliar.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan dukungan terhadap percepatan program kerja Kemenhub diberikan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga sebagai antisipasi cuaca yang biasanya kurang baik pada akhir tahun sehingga tantangan di lapangan pasti besar. Sementara di sisi lain, diharapkan APBN mampu memberikan daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Atensi DPR

Komisi V DPR RI memberikan persetujuan terhadap tambahan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp2,74 triliun untuk Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut diputuskan dalam rapat kerja bersama Kemenhub pada 4 September 2025, seiring dengan penyampaian perkembangan pagu efektif kepada pimpinan Komisi V. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa pagu efektif Kemenhub awalnya sebesar Rp26,76 triliun, dan setelah penambahan menjadi Rp29,50 triliun. Dalam mendukung hal ini, penting bagi Komisi V DPR RI melalui fungsi pengawasan untuk terus mendorong transparansi penggunaan anggaran Kemenhub melalui percepatan program kerja yang berdampak langsung pada konektivitas, layanan transportasi publik, serta perekonomian nasional. Komisi V DPR RI juga perlu mendukung agar anggaran tambahan ini tidak hanya untuk memperkuat belanja pegawai dan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk subsidi angkutan darat, laut, udara, dan kereta api perintis agar tepat sasaran. Dukungan ini agar APBN menjadi instrumen yang mampu menjaga stabilitas pelayanan transportasi dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Sumber

dephub.go.id, 4 September 2025;
finance.detik.com, 4 September 2025; dan
liputan6.com, 6 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*